

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori *Stewardship*.

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana *steward* lebih mementingkan pencapaian suatu organisasi dibandingkan tujuan ataupun kepentingan individu (Donaldson dan Davis, 1989). Teori ini juga mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar seorang *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan *principal*. Selain itu menurut Donaldson dan Davis (1989) menyatakan bahwa teori *Stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya*.

Teori *Stewardship* mempunyai dasar bahwa kepentingan bersama merupakan hal yang harus didahulukan oleh seorang manajer atau *steward*. Apabila kepentingan dari *steward* dan *principal* berbeda maka *steward* akan berusaha bekerja sama sehingga mendapatkan keputusan yang dianggap adil dari pada menentanginya. Hal tersebut dikarenakan *steward* lebih mementingkan tercapainya tujuan dari organisasi. Meskipun *steward* selalu mendahulukan kepentingan bersama bukan berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan pribadi (Raharjo, 2007).

Teori *Stewardship* menggambarkan tentang pola hubungan antara atasan dan bawahan dengan menggunakan mekanisme situasional. Kepentingan ini meliputi filosofi manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing (Anton, 2010)

**Tabel 2.1.**  
**Teori *Stewardship***

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Model                 | Aktualisasi diri  |
| Perilaku              | Melayani orang lain   |
| Mekanisme Psikologi   |   |
| -Motivasi             | Kebutuhan yang lebih tinggi (pertumbuhan, prestasi, aktualisasi diri) |
| -Perbandingan Sosial  | Intrinsik   |
| -Identifikasi         | <i>Principal</i> Menilai komitmen tinggi (pakar, referen)             |
| -Kekuasaan            | Perseorangan  |
| Mekanisme Situasional |   |
| -Filosofi Manajemen   | Kepercayaan   |
| -Orientasi Resiko     | Jangka panjang  |
| -Kerangka Waktu       | Perbaikan kinerja   |
| -Tujuan               | Kebersamaan   |
| -Perbedaan Budaya     | Rentang kekuasaan rendah  |

Sumber : Majalah Ilmiah Informatika, 2010

Penelitian ini menggunakan teori *Stewardship* karena teori ini mempunyai pandangan bahwa *steward* dapat dipercaya ketika bertindak dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Teori ini juga menjelaskan bahwa kinerja suatu organisasi dapat meningkat ketika seorang pemimpin mempunyai sifat amanah dan mempunyai komitmen terhadap organisasi.

## **2. Pengendalian Internal.**

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang di implementasikan oleh manajemen perusahaan dan dewan direksi, serta dirancang untuk memenuhi lima tujuan, yaitu menjaga aset, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, mempromosikan efisiensi operasional, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, dan menaati persyaratan hukum (Horrisson dkk, 2011).

Menurut Mayangsari dan Wandanarum (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah penggunaan sumberdaya pada perusahaan untuk meningkatkan aktivitas yang ada, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas yang ada yang dilakukan oleh perusahaan dari dalam perusahaan, sehingga tujuan utama dari perusahaan dapat tercapai secara efisien.

Sukrisno (2012) pada penelitiannya mendefinisikan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya dalam entitas-entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian pada tiga golongan tujuan (keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi) operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### **3. *Good Government Governance (GGG).***

Pratolo dan Jatmiko (2017) menyatakan bahwa *Good Government Governance (GGG)* adalah suatu penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Sutjiatmi (2012) menyatakan bahwa *Good Government Governance (GGG)* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

### **4. Kecurangan.**

Kecurangan (*fraud*) merupakan pernyataan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dilakukan secara sengaja, untuk tujuan membujuk pihak lainnya agar bertindak dengan cara yang merugikan pihak bersangkutan, kecurangan merupakan tindakan paling tidak etis dalam bisnis (Horrison dkk, 2011). Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Arens *et al* (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, yaitu dengan cara menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi, memberikan tanggung

jawab kepada seorang pemimpin untuk mengavaluasi resiko kecurangan dan melakukan pengawasan pada internal organisasi.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter (2016)* kecurangan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi. Dari tiga jenis kecurangan tersebut, korupsi merupakan tindak kecurangan yang paling sering dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan juga cukup besar dibandingkan dengan tindak kecurangan lainnya. Selain itu tindak kecurangan korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja yang berada di lingkungan organisasi. Korupsi juga merupakan tindakan kecurangan yang paling sulit dideteksi dibanding dengan tindak kecurangan lainnya. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan menyangkut beberapa pihak.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Hipotesis**

### **1. Pengendalian Internal terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan.**

Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik ketika seorang pemimpin atau pemangku kepentingan tidak selalu mementingkan kepentingan pribadi. Namun, selalu dapat mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu internal organisasi sangat erat dengan perbedaan kepentingan sehingga dalam

organisasi sangat dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengambil keputusan yang adil tanpa menentang.

Ketika suatu organisasi pemerintahan telah memenuhi komponen dari pengendalian internal seperti, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, sistem informasi, kegiatan pengendalian dan pemantauan, maka tindak pencegahan kecurangan pada organisasi pemerintahan dapat di tingkatkan. Tindak pencegahan kecurangan pada suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan situasi internal organisasi sehingga ketika lingkungan internal suatu organisasinya baik, maka dapat di pastikan bahwa tindak pencegahan kecurangan pada organisasi tersebut telah diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) dengan sampel 72 SKPD di Provinsi Maluku Utara, menyatakan bahwa pengendalian internal yang baik pada suatu pemerintahan maka akan dapat meminimalisir serta mencegah kecurangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tuanakotta (2013) dan COSO (1994) dalam Soleman (2013) menyatakan bahwa tindak pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan pengendalian internal yang baik dan tepat.

Namun pada penelitian yang dilakukan di India dengan sampel 253 karyawan bank menyatakan bahwa tidak semua komponen pada pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan di suatu pemerintahan (Khanna & Arora, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskannya hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan.

## **2. *Good Government Governance* (GGG) terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan.**

Seorang pemangku kepentingan yang mempunyai sifat amanah yang dapat menyampaikan saran dari masyarakat dan dapat mengambil tindakan yang tepat guna kepentingan bersama sangat dibutuhkan guna mencapai suatu organisasi yang baik. Ketika suatu perusahaan atau organisasi telah menarapkan *Good Government Governance* (GGG) dengan baik maka organisasi tersebut dapat meminimalisir dan mencegah kecurangan. Apabila *Good Government Governance* (GGG) telah diterapkan dengan tepat dan baik maka akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga, dapat menjadi salah satu tindak pencegahan terjadinya kecurangan. Selain itu, apabila dalam suatu organisasi telah menjalankan kepatuhan hukum yang berlaku, mementingkan kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektif dan efisien maka, pegawai pada organisasi tersebut tidak mempunyai peluang untuk melakukan tindak kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Gusnardi (2009) pada 13 BUMN di Indonesia dalam Soleman (2013) menyatakan bahwa ketika suatu

perusahaan mempunyai sistem tata kelola perusahaan yang baik maka dapat mencegah serta meminimalisir kecurangan. Mendukung penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta (2014) dengan sampel 30 responden yang bekerja di Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur menyatakan bahwa ketika suatu pemerintahan telah menerapkan *Good Government Governance* (GGG) yang baik dan tepat maka tindak pencegahan kecurangan akan semakin meningkat.

Namun menurut Pratolo (2017) menyatakan bahwa pada negara berkembang, belum semuanya mengelola keuangan publik dengan baik yang menjadi persyaratan perencanaan dan penerapan tatakelola berorientasi pembangunan. Sedangkan telah kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana penerapan dari *Good Government Governance* (GGG) belum terlalu diterapkan. Sehingga, pencegahan kecurangan di Indonesia masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan.



**C. Model Penelitian**